

Konflik Kekerasan Antar-Kelompok Perguruan Pencak Silat: Proses Pembentukan Identitas Sosial yang Terdistorsi

Ali Maksum

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Surabaya

Abstract. Intergroup conflicts in sport, especially when charged with violence, is a complex phenomena and could be manifested differently in shape and realization from time to time. This study was keen to find empirical data concerning harsh conflicts between two traditional martial art organizations namely the Pencak Silat Setia Hati Terate (SHT) and Pencak Silat Setia Hati Tunas Muda Winongo (SHW). These data were then used as a foundation to build a theoretical construct concerning violent behavior in sport. This study was conducted using a qualitative approach by case study to collect data. It is concluded that conflict happened due to a distorted social identity building process.

Key words: conflict, violence, social identity, traditional self-defence art

Abstrak. Konflik antar-kelompok dalam olahraga, apalagi yang bermuatan kekerasan, merupakan fenomena yang kompleks dan bisa jadi berbeda dalam bentuk dan perwujudannya dari waktu ke waktu. Penelitian ini berusaha menemukan fakta empiris terkait dengan konflik kekerasan antar-kelompok organisasi Pencak Silat SHT dan SHW. Fakta empiris tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar menyusun konstruksi teoretis mengenai perilaku kekerasan dalam olahraga. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode *case study*. Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa konflik terjadi karena proses pembentukan identitas sosial yang terdistorsi.

Kata kunci: konflik, kekerasan, identitas sosial, pencak silat

Apa yang ada dalam benak ketika kita membaca berita sebagai berikut.

Bentrok merajalela, Madiun mencekam. Puluhan rumah rusak, mobil dan motor dibakar. Lagi-lagi, dua perguruan silat di Madiun bentrok massal. Ulah brutal anggota perguruan itu berubah menjadi kerusuhan massal yang merugikan masyarakat. Bukan hanya mereka yang bermusuhan yang saling merusak, tetapi warga yang tak berkaitan dengan masalah juga menjadi korban (Bentrok Merajalela..., 2003).

Kutipan tersebut hanyalah salah satu penggalan berita, yang menggambarkan konflik kekerasan yang melibatkan anggota dua perguruan Pencak Silat terbesar di Madiun, yakni Setia Hati Terate (SHT) dan Setia Hati Tunas Muda Winongo (SHW). Kerusuhan seperti itu sudah sering terjadi di Madiun. Korban tidak hanya terjadi di kedua belah pihak, melainkan juga di masyarakat yang tidak terlibat konflik. Kerusuhan juga meluas hingga di luar wilayah Madiun, se-

perti Magetan, Nganjuk, Ponorogo, dan Ngawi.

Dengan membaca berita tersebut, tentu kita menaruh keprihatinan yang begitu dalam. Betapa tidak, olahraga Pencak Silat yang seharusnya dapat digunakan sebagai instrumen membangun karakter bagi yang melakukannya (Maksum, 2005, 2007; Shields, & Bredemeier, 1994) justru berubah menjadi ajang konflik kekerasan yang tidak jarang berujung pada kerusuhan, pengrusakan, pembakaran, dan bahkan korban jiwa. Dampaknya pada masyarakat Madiun juga begitu luar biasa, tidak saja kerugian material seperti dikemukakan terdahulu, tetapi juga non-material seperti kekhawatiran dan ketakutan di antara anggota masyarakat.

Bagaimana itu semua bisa terjadi? Bukankah kedua perguruan tersebut bersumber dari ajaran yang sama? Apa yang salah dari pembinaan anggota kedua perguruan tersebut? Sampai sekarang belum ada jawaban yang memuaskan.

Percikan kasus ini sebenarnya telah terjadi jauh sebelum pemerintahan Orde Baru runtuh, yakni sekitar 1980-an (Umam, 2007). Namun seiring munculnya era reformasi, tepatnya 1998, konflik kekerasan yang melibatkan anggota dua perguruan se-

Korespondensi mengenai artikel ini disampaikan kepada Dr. Ali Maksum, S.Pd., M.Si. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya, Lidah Wetan, Surabaya 20213. E-mail: alymaks@yahoo.com

makin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Meski sekarang intensitasnya menurun, terutama setelah dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak pada 9 Oktober 2003 melalui MoU “Kami Adalah Satu”, namun kasus serupa masih sering terjadi hingga hari ini.

Kasus konflik kekerasan yang melibatkan anggota dua perguruan Pencak Silat ini menarik untuk diungkap karena terjadi secara berulang-ulang, telah mengarah pada kerusuhan massal (Bentrok Merajalela..., 2003), dan menimbulkan kerugian yang cukup besar, termasuk adanya korban jiwa (Kerusuhan Plaosan..., 2002). Permasalahan mendasar yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah: (1) bagaimana peta konflik kekerasan antara SHT dan SHW, (2) faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya konflik kekerasan tersebut, dan (3) bagaimana pola terjadinya konflik kekerasan antar-kelompok perguruan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan teori kekerasan, khususnya dalam konteks olahraga. Target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendapatkan fakta empiris terkait dengan konflik kekerasan antar-kelompok organisasi keolahragaan. Fakta empiris tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar menyusun konstruksi teoretis mengenai perilaku kekerasan dalam olahraga. Dengan demikian luaran utama penelitian ini adalah model teoretis perilaku kekerasan dalam olahraga, terutama yang melibatkan kelompok. Model teoretis tersebut setidaknya menjawab pertanyaan: mengapa konflik kekerasan dalam olahraga terjadi, faktor apa yang menyebabkan, dan bagaimana proses terjadinya perilaku kekerasan tersebut? Model teoretis di-konstruksi berdasarkan fakta empiris di lapangan dan pada saat yang sama melakukan konfirmasi pada sejumlah konsep teoretik yang ada.

Dalam perilaku kekerasan, setidaknya terdapat tiga teori yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan, yaitu teori frustrasi-agresi dari Dollard, dkk; teori konflik-realistik dari Sherif, dan teori identitas sosial dari Tajfel (sitat dalam Hewstone & Cairns, 2006).

Teori Frustrasi-Agresi. Teori ini mengatakan bahwa frustrasi—dalam hal ini adalah terhalangnya suatu tujuan—selalu menyebabkan agresi, yakni intensi untuk menyakiti orang lain. Sebagai ilustrasi, tim sepakbola yang merasa sering dirugikan oleh wasit (kondisi frustrasi), melakukan pemukulan ke-

pada wasit yang bersangkutan (perilaku agresi). Meskipun dalam banyak kasus asumsi teori ini kurang tepat—karena tidak selalu kondisi frustrasi akan bermuara kepada perilaku agresi—namun tidak begitu mudah untuk diabaikan begitu saja.

Teori Konflik-Realistik. Teori ini mengatakan bahwa konflik kelompok disebabkan oleh kepentingan memperebutkan berbagai sumber (*resources*): ekonomi dan kekuasaan yang memang terbatas atau langka. Karena sumbernya yang terbatas, maka untuk memperolehnya harus bersaing sehingga ada salah satu pihak yang menjadi pemenang dan pihak lain yang kalah. Sangat mungkin terjadi akibat persaingan yang bersifat *win-lose orientation*, pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan di antara mereka. Selain itu, perilaku kekerasan menurut teori ini bisa juga terjadi karena pertentangan nilai dan/atau keyakinan di antara mereka. Kuat dugaan, konflik kekerasan antar-perguruan pencak silat yang terjadi di Madiun disebabkan karena persoalan ini, meskipun masih memerlukan pembuktian di lapangan.

Teori Identitas Sosial. Berbeda dengan dua teori sebelumnya, teori ini menyatakan bahwa konflik antar-kelompok bukan disebabkan oleh frustrasi atau karena perebutan sumber-sumber yang langka, tetapi terjadi karena menyangkut identitas kelompok. Dalam realitas kehidupan, seseorang seringkali dikelompokkan atau dikategorikan atas dasar agama, suku, atau organisasi yang diikuti. Seseorang akan selektif menentukan kategori yang dapat memenuhi identitas sosialnya, terutama identitas yang positif. Dari sinilah kemudian muncul *in-group – out-group*, yaitu menganggap kelompoknyalah yang paling benar, sementara kelompok lain dianggap salah (*ingroup favouritism bias*). Memperhatikan anatomi konflik yang terjadi, kuat dugaan konflik antar-perguruan pencak silat di Madiun terjadi karena pembenaran satu kelompok atas yang lain (Giulianotti, Bonney, & Hepworth, 1994; Wann, Shelton, Smith, & Walker, 2002). Hal ini diawali ketika terjadi perbedaan pendapat di antara pendiri perguruan yang pada gilirannya menyebabkan perguruan pencak silat yang semula satu menjadi pecah. Sekali lagi, ini baru sebatas dugaan yang masih perlu dibuktikan dengan fakta empiris.

Landasan teoretis tersebut pada dasarnya lebih merupakan kerangka pikir daripada sekadar pernyataan teoretik yang memerlukan verifikasi dan pengujian. Setidaknya dari kerangka pikir teoretik ter-

sebut dapat diketahui posisi teoretis peneliti dalam memahami gejala empiris di lapangan, yang sama sekali tidak berangkat dari titik “nol”. Walaupun demikian, landasan teoretis tersebut masih mungkin berubah dalam arti dapat dikoreksi, berkurang atau pun berkembang jika ditemukan fakta dan pemahaman baru di lapangan.

Metode

Sesuai dengan karakteristik masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini, maka metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Denzin & Lincoln, 1994; Ritchie & Lewis, 2003) adalah pilihan dengan dasar pemikiran mantap. Sebagaimana dikemukakan di depan bahwa konflik kekerasan antar-dua perguruan Pencak Silat di Madiun menjadi menarik dan penting untuk dijadikan kasus (objek studi) karena kasus tersebut telah terjadi berulang-ulang. Selain itu, konflik kekerasan tersebut juga menimbulkan korban yang tidak sedikit. Kasus Madiun ini akan didalami, dideskripsikan, dan dipahami untuk kemudian menemukan konsep dan pola dari konsep tersebut (Creswell, 1994; Denzin & Lincoln, 1994; Ritchie & Lewis, 2003). Berdasarkan konsep dan pola yang ditemukan dari kasus tersebut, demikian juga mengonfirmasi sejumlah teori yang relevan, akan dibangun sebuah teori kekerasan kelompok dalam olahraga.

Penelitian dilakukan dalam 2 tahap, yakni *preliminary study* dan *field study*. Pada tahap *preliminary study* peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap sejumlah artikel koran, rekaman audio-visual, hasil penelitian, dan referensi yang relevan. Selain itu, juga dilakukan observasi lapangan dan meminta informasi kepada pihak-pihak terkait seperti kelompok perguruan, kepolisian, dan tokoh masyarakat. Pada tahap *field study*, peneliti melakukan *focus group discussion* (FGD) dengan beberapa pihak, yaitu: (a) kepolisian resort Madiun, (b) tokoh masyarakat, (c) perguruan Pencak Silat SHT, dan (d) perguruan Pencak Silat SHW. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam kepada sejumlah pelaku kekerasan. Sebagai kasus adalah perilaku kekerasan antara kelompok perguruan Pencak Silat SHT dan SHW di wilayah Madiun. Pemilihan partisipan penelitian dilakukan dengan kombinasi teknik *purposefull sampling* dan *snowball sampling* (Patton,

1990).

Data dianalisis melalui proses penyandian (*coding*) dengan menggunakan pola pikir induktif untuk menemukan faktor atau tema baru di lapangan. Untuk menjaga kredibilitas penelitian, peneliti menggunakan langkah-langkah seperti triangulasi (*triangulation*), diskusi dengan teman sejawat (*peer debriefing*), memperpanjang masa pengamatan (*prolonged engagement*), dan pengecekan anggota (*member checks*) (Denzin & Lincoln, 1994; Ritchie & Lewis, 2003).

Triangulasi dilakukan baik melalui metode maupun sumber data. Triangulasi metode dilakukan dengan penerapan berbagai metode pengumpulan data dalam serangkaian proses penelitian, yakni studi dokumentasi, wawancara, dan pengamatan. Sementara itu, triangulasi sumber data dilakukan terhadap berbagai sumber informasi yang diperoleh seperti kumpulan berita media massa, hasil penelitian pihak lain, video kejadian, hasil wawancara dengan informan (kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh kedua perguruan, dan pelaku tindak kekerasan) dan observasi terhadap lingkungan perguruan serta sejumlah tempat terjadinya tindak kekerasan.

Diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan cara pemaparan temuan, baik dari hasil *preliminary study* maupun *field study*. Langkah ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang substansial, pandangan kritis termasuk di dalamnya melakukan kritik terhadap “hipotesis kerja” peneliti dan temuan penelitian yang telah dihasilkan. Dengan demikian fungsi diskusi teman sejawat lebih sebagai pengkritik yang tajam daripada pengagum hasil penelitian.

Peningkatan kredibilitas penelitian juga dilakukan dengan cara memperlama masa keterlibatan peneliti dalam konteks dan latar penelitian, yakni di wilayah Madiun. Hal ini dilakukan, selain sebagai upaya membangun jejaring dan kepercayaan dengan subjek penelitian, juga untuk memahami lebih dalam mengenai budaya, kebiasaan, dan perilaku masyarakat Madiun. Langkah ini kemudian dilengkapi dengan pengecekan anggota, dalam hal ini para responden, yang terlibat dalam penelitian. Pengecekan dimaksudkan memberi kesempatan bagi para responden untuk mempelajari kebenaran data, kecukupan data, dan pemaknaannya. Dengan demikian, temuan yang diperoleh dari proses penelitian dapat dijamin keabsahannya.

Hasil dan Bahasan

Preliminary Study

Berdasarkan sejumlah dokumen yang telah peneliti dapatkan, yaitu: kliping berita harian Jawa Pos, Surya, Suara Karya, Tempo, dan Kompas; artikel di internet dalam sejumlah *website* resmi seperti www.shterate.com; www.silatindonesia@yahoo.com, dokumen audio visual dari TVRI; dan hasil penelitian Umam (2007) tentang konflik SHT dan SHW, maka hasilnya sementara dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Konflik SHT dan SHW dimulai setelah Ki Ngabehi Soerodiwiryo, pendiri ajaran ke-SH-an meninggal pada tanggal 10 Nopember 1944 dalam usia 75 tahun. Dugaan tersebut didasarkan pada satu keyakinan bahwa ketika seseorang yang ditokohkan dalam suatu organisasi tidak ada, apalagi dalam dunia persilatan, maka besar kemungkinan mereka yang masih ada akan berebut kekuasaan dan pengaruh.

2. Sepeninggal Eyang Soero, SH terpecah menjadi dua, SH Winongo dengan basis wilayah perkotaan, dengan pusatnya di desa Winongo, tempat dimakamkannya Ki Soero dan SH Terate dengan basis daerah pinggiran dan pedesaan dengan pusatnya di desa Pilangbangau. Tokoh pendiri SH Terate adalah Ki Hajar Harjo Utomo, sedangkan pendiri SH Winongo adalah R. Djimat Hendro Soewarno. Dari sini seolah ada klaim kebenaran (*social identity theory*) dari pihak masing-masing. SHT menganggap bahwa dirinyalah penerus aliran SH yang sebenarnya, sementara SHW juga menganggap dirinyalah penerus ajaran SH yang didirikan sejak 1903.

3. Tahun 1945-1965, di antara anggota salah satu perguruan diduga berafiliasi dengan PKI. Sementara perguruan yang lain menganggap ilmu ke-SH-an yang diturunkan Mbah Soero berbasis ajaran Islam, sehingga perguruan tersebut dianggap keluar dari jalur. Konflik fisik pun tak bisa dihindari. Puncaknya, ketika terjadi pembersihan PKI tahun 1967-1971, diduga banyak anggota salah satu perguruan yang menjadi algojo, di antaranya terhadap orang-orang anggota perguruan tersebut (Syahril, 2007). Dari peristiwa tersebut terkesan ada semacam dendam sejarah di antara keduanya. Konflik kekerasan terjadi sebagai bagian dari babak sejarah.

4. Konflik semakin parah dengan adanya pihak ketiga yang memiliki kepentingan. Misalnya mantan bupati Ponorogo 1998, yang juga tokoh parpol menjadi anggota kehormatan salah satu perguruan. Demikian juga Ketua DPRD Kota Madiun sekarang dijabat oleh tokoh berpengaruh dari salah satu perguruan. Artinya, ketika pihak-pihak yang seharusnya dapat menyelesaikan konflik secara *fair*, justru menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Sehingga kesan diskriminatif, yakni perlakuan yang tidak sama terhadap kelompok masyarakat menjadi sulit dihindarkan.

5. Konflik semakin meluas dengan motif perebutan pengaruh yang berarti juga perebutan basis ekonomi. Contoh kasus, pada 2002 SHT melakukan pelantikan setiap tanggal 1 Suro sejumlah 1000-2000 anggota baru. Jika saja setiap anggota dikenakan 700 ribu rupiah, maka uang yang akan masuk ke organisasi sebesar 700 juta hingga 1,4 milyar per tahun (Umam, 2007). Meskipun kebenaran data ini perlu ditelusuri lebih jauh.

6. Sejarah Madiun yang lekat dengan tradisi kekerasan, kultur masyarakat yang bersifat agraris dengan banyak waktu luang, ideologi Pencak Silat yang dekat dengan olah kebatinan (*kejawen*) tampaknya menjadi faktor pendorong dan pada saat yang sama membuat konflik kekerasan berlangsung cukup lama.

Apa yang dikemukakan terdahulu pada dasarnya masih merupakan temuan awal dan bersifat sementara. Temuan tersebut akan ditelusuri dan didalami lebih lanjut dalam penelitian lapangan (*field study*). Ada kemungkinan temuan tersebut berubah, dalam arti ditambah, dikurangi, atau bahkan tidak benar sama sekali. Tetapi, setidaknya dari temuan tersebut peneliti memiliki bahan awal untuk masuk lebih dalam ke proses penelitian lapangan (*field study*).

Field Study

Peta Konflik Kekerasan

Dilihat dari perspektif sejarah, sebenarnya kedua perguruan ini memiliki basis ajaran yang sama, yakni ajaran ke-SH-an yang berintikan pada olahraga dan olah batin untuk mencapai keluhuran budi guna meraih kesempurnaan hidup (Harsono, 2003; Soewarno, 1994). Perguruan Pencak Silat dengan

basis Ilmu SH pertama kali dicetuskan oleh Ki Ngabei Soerodiwiryo tahun 1903. Ketika itu, belum menggunakan nama Setia Hati, melainkan bernama Joyo Gendilo Cipto Mulyo (ada yang menyebut Sedulur Tunggal Kecer) yang berdiri di kampung Tambak Gringsing Surabaya (Umam, 2007). Baru pada 1917 berubah nama menjadi Setia Hati (SH).

Murid Eyang Soero, panggilan akrab Ki Ngabei Soerodiwiryo, ketika itu tidak banyak. Pertama dua orang, yakni Noto-Gunari (adik kandung Ki Soero sendiri) dan Kenevel (Belanda), kemudian meningkat menjadi 8 orang (Umam, 2007). Bagaimana Pencak Silat SH bisa sampai di Madiun? Eyang Soero sebagai tokoh sentral memang sering berpindah tempat dari kota satu ke kota lain. Maklum, ketika itu Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing. Pergerakan masyarakat, apalagi yang diduga akan mengancam eksistensi penjajah di bumi nusantara ini selalu dicurigai. Dengan demikian perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dianggap sebagai strategi yang efektif untuk menghilangkan jejak.

Sekitar 1917, perguruan tersebut mengadakan peragaan Pencak Silat secara terbuka di Alon-Alon kota Madiun. Masyarakat cukup antusias menyaksikan pagelaran tersebut, mengingat gerakannya yang unik, memiliki nilai seni, dan bertenaga. Mereka yang mahir dalam Pencak Silat dianggap sebagai pendekar yang memiliki kelebihan. Seiring berjalannya waktu, banyak anggota masyarakat yang ingin bergabung dalam perguruan tersebut, kendati dalam perkembangannya juga tidak semulus yang dibayangkan, mengingat, kurun waktu tersebut adalah masa perjuangan melawan penjajah Belanda. Sebagai sebuah perkumpulan, Joyo Gendilo Cipto Mulyo sering dicurigai sebagai gerakan perjuangan melawan Belanda.

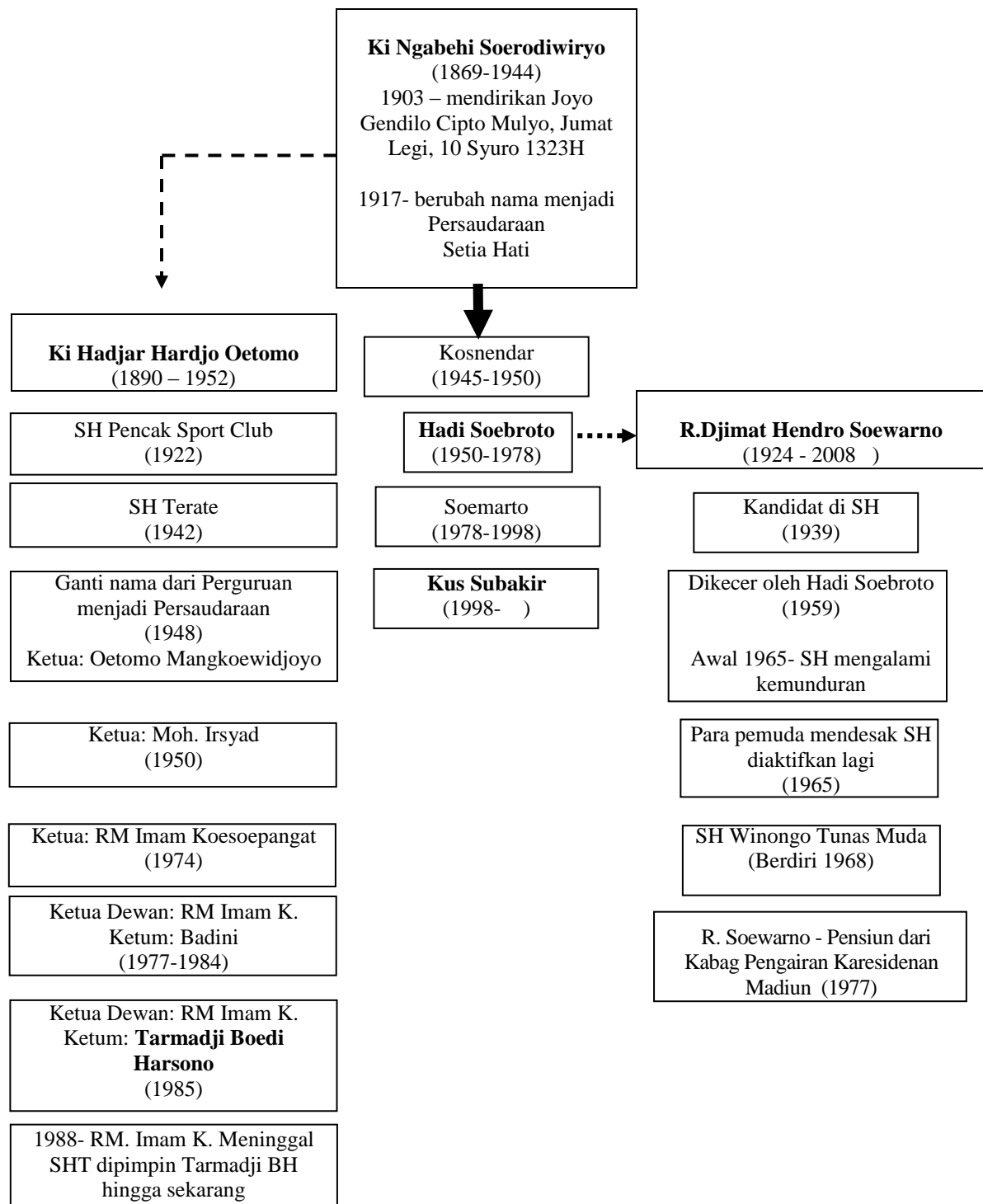
Sifat keanggotaan SH ketika itu relatif eksklusif, terbatas pada mereka yang tergolong “ningrat,” seperti Bupati, Camat, dan pegawai pemerintah. Dengan pola rekrutmen seperti itu sudah dapat diduga bahwa perkembangannya relatif lambat. Sebagai sebuah alat perjuangan, tentu hal tersebut kurang efektif. Melihat kondisi yang demikian, salah satu murid Eyang Soero, yakni Ki Hadjar Hardjo Utomo menggagas pola penyebaran ajaran SH dengan target masyarakat bawah. Gagasan tersebut tampaknya akan sulit terwujud, karena dalam doktrin ke-SH-an, penyebaran ilmu SH tidak bisa dilakukan kepada semua orang dan di semua tempat.

Keinginan Ki Hadjar Hardjo Utomo tampaknya tidak bisa dibendung lagi. Dengan bekal ilmu yang ia miliki, ia akhirnya memberanikan diri mendirikan perguruan Pencak Silat sendiri. Sungguh pun tidak secara nyata memberikan restu atas keinginan muridnya tersebut, Eyang Soero juga tidak bisa melarangnya. Sebab, dalam ajaran SH, apa yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya merupakan tanggung jawab pribadi (Wawancara dengan Kus Subakir, 21 Juli 2007) (lihat Lampiran 1).

Organisasi yang diberi nama Setia Hati Pencak Sport Club inilah yang kemudian menjadi cikal bakal perguruan SH Terate (Harsono, 2003). Perguruan tersebut didirikan pada 1922 di Desa Pilangbango Madiun (sekarang Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun). Salah satu misi organisasi tersebut adalah membekali keterampilan bela diri pemuda sebagai bekal menentang penjajahan Belanda (Harsono, 2003).

Meskipun memiliki tujuan yang relatif sama, yaitu menyebarluaskan ajaran SH, namun tampaknya ada model orientasi perjuangan yang berbeda antara Sang Guru dengan muridnya. Eyang Soero lebih berorientasi pada kelompok masyarakat tertentu yang relatif ningrat, sementara Hardjo Utomo lebih berorientasi pada masyarakat luas, termasuk tingkat bawah. Dengan strategi yang pertama, kualitas ilmu SH memang relatif terjaga, karena dengan kriteria tersebut, mereka yang menjadi anggota dianggap telah memiliki stabilitas emosi, sosial, dan finansial. Namun, konsekuensinya, perkembangannya relatif lambat karena cakupannya terbatas dan hal ini berdampak pada jumlah keanggotaan. Sementara itu dengan strategi kedua, perkembangan SH semakin cepat didukung dengan keanggotaan yang meluas, termasuk remaja belasan tahun. Konsekuensinya, distorsi ilmu SH sebagai akibat belum matangnya kepribadian sebagian anggotanya menjadi sulit untuk dihindarkan. Strategi pertama hingga sekarang masih dipegang oleh SH Panti dengan Kus Subakir sebagai pimpinannya, yang mengklaim sebagai pemegang otoritas ilmu SH, dan strategi kedua dikembangkan oleh SHT hingga sekarang ini di bawah pimpinan Tarmadji Boedi Harsono.

Lalu, dimana posisi SHW? SHW lahir sebagai bentuk keprihatinan para pemuda atas kemunduran Perguruan SH, terutama setelah beberapa waktu Eyang Soero meninggal (Soewarno, 1994). Para pemuda mendesak para senior ketika itu, termasuk



Gambar 1. Alur SHT dan SHW dalam bingkai sejarah SH.

R. Djimat Hendro Soewarno, untuk membangkitkan kembali Perguruan SH. Akhirnya, sekitar tahun 1968

R. Soewarno mendirikan perguruan yang diberi nama Persaudaraan SH Winongo Tunas Muda

(Soewarno, 1994). Dilihat dari sejumlah dokumen, misalnya buku Pusaka Pencak Silat dalam Tiga Zaman, dan fakta lapangan seperti lingkungan padepokan, SHW sangat menjunjung tinggi Eyang Soero sebagai pencetus ilmu SH. Perguruan ini juga menjadikan acara berkunjung ke makam Eyang Soero sebagai salah satu ritual “sah-sahan” rekrutmen anggota baru. Sebenarnya, Soewarno sendiri menurut Kus Subakir, tidak pernah berguru langsung kepada Eyang Soero (Wawancara, 21 Juli 2007).

Eyang Soero sendiri meninggal pada 10 Nopember 1944 dalam usia 75 tahun. Sepeninggal Eyang Soero, tepatnya antara 1945-1950, kepemimpinan SH Pantj dilanjutkan oleh Koesnendar, seorang ningrat berkedudukan bupati. Kemudian pada 1950-1978, kepemimpinan dilanjutkan oleh Hadi Soebroto. Pada kepemimpinan generasi kedua inilah, R. Soewarno, pendiri sekaligus pengasuh SHW di-*kecer*.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jalur pengembangan ilmu ke-SH-an, yaitu SH Pantj, SHT, dan SHW. Masing-masing memiliki organisasi dan padepokan sendiri. SH Pantj berada di Kelurahan Winongo, menempati rumah mendiang Eyang Soero. SHT memiliki padepokan di Jalan Merak Nambangan Kidul Kota Madiun. Sementara itu, SHW memiliki padepokan di Jalan Doho No. 123 Winongo kota Madiun, tempat kediaman R. Soewarno.

Pertanyaannya kemudian, mengapa kasus kekerasan lebih banyak melibatkan SHT dan SHW? Dua perguruan yang dianggap sebagai sempalan dari SH tersebut. Apakah perbedaan tafsir ideologi ke-SH-an menjadi penyebab terjadinya konflik kekerasan? Mungkinkah itu karena indoktrinasi yang diberikan selama proses pembentukan pendekar? Perebutan basis pengaruh? Atau itu hanya merupakan kenakalan remaja pada umumnya?

Konflik kekerasan yang melibatkan anggota perguruan SHT dan SHW sebenarnya telah terjadi jauh sebelum reformasi, meskipun dalam skala yang mikro. Namun seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, yang ditandai dengan runtuhnya Orde Baru, eskalasi konflik kekerasan semakin meningkat. Berdasarkan data di Kepolisian Madiun sejak Maret 1998 hingga Februari 2007, telah terjadi 217 kasus kekerasan, 180 kasus terjadi di wilayah Kabupaten Madiun dan 37 kasus terjadi di wilayah Kota Madiun.

Banyaknya jumlah kasus di wilayah Kabupaten Madiun dibanding di Kota Madiun tentu dapat dipahami. Dari segi teritorial, Kabupaten Madiun lebih luas, terdiri atas 15 kecamatan, sementara Kota Madiun hanya tiga kecamatan. Terkait itu pula, jumlah anggota perguruan, baik SHT maupun SHW, lebih besar di wilayah kabupaten. Mereka tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Dari lima belas kecamatan yang ada, terdapat 5 kecamatan yang menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah kasus kekerasan. Masing-masing adalah Kecamatan Geger, Danganan, Wungu, Dolopo, dan Mejayan. Tiga kecamatan pertama, secara geografis, berbatasan langsung dengan wilayah kota. Meskipun tidak ada angka yang pasti, lima wilayah tersebut memiliki jumlah keanggotaan paling banyak. Dengan kata lain, wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah basis kedua perguruan.

Dilihat dari jenis kasus kekerasan yang terjadi selama kurun waktu 1998-2007, kasus penganiayaan, pengrusakan, dan pengeroyokan menempati urutan teratas. Kasus-kasus tersebut umumnya terjadi ketika individu atau sekelompok individu dari kedua belah pihak yang saling berseteru tersebut bertemu. Secara spontan maupun terencana, karena hal yang sepele, misalnya karena saling memandang, bisa menyebabkan konflik kekerasan terjadi.

Masalah memandang saja, sudah dapat menimbulkan persoalan. Image orang SHT pasti bermusuhan dengan orang SHW, walaupun dia tidak berbuat apa-apa. Mereka bertindak apapun ada keinginan untuk melakukan perlawanan karena nggak terima. Misalnya, waktu saya main didesa sebelah terus ketemu ”B”, dia bilang: “Kalau saya melirik, saya mau dipukuli” (Wawancara dengan P2, 25 Oktober 2007).

Waktu tampaknya juga ikut memengaruhi frekuensi terjadinya konflik kekerasan. Berdasarkan analisis data sebagaimana tampak pada Gambar 1, jumlah kejadian meningkat pada bulan Januari hingga Maret, menurun pada bulan Juni-Juli, dan kemudian meningkat lagi pada bulan Agustus. Tampaknya ada semacam siklus, kapan konflik kekerasan akan tinggi dan kapan akan relatif berkurang. Kasus kekerasan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu, sebenarnya telah dapat diprediksi. Misalnya pada acara Suroan, Halal bi Halal, dan perayaan hari kemerdekaan, yang memang massa berkumpul dalam jumlah besar. Yang menyulitkan adalah ketika ka-

sus kekerasan terjadi secara spontan, dan memang inilah yang banyak terjadi. Bentuknya bisa berupa penganiayaan dan pengeroyokan. Sangat mungkin awalnya hanya orang per orang atau sekelompok kecil orang, tetapi masalah kemudian menggelinding dengan melibatkan kelompok yang lebih besar.

Yang menarik sebagian besar pelaku konflik kekerasan adalah mereka para remaja yang berusia antara 15-30 tahun. Usia ketika mereka sedang mencari identitas, meneguhkan jati dirinya, meskipun bersifat negatif. Pada komunitas seperti itu, kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan pada tingkatan tertentu justru merupakan simbol kelakikan. Penganiayaan dilakukan kepada pihak lain, dalam hal ini bisa anggota SHT maupun SHW, tergantung posisinya saat itu, yang dianggap lemah.

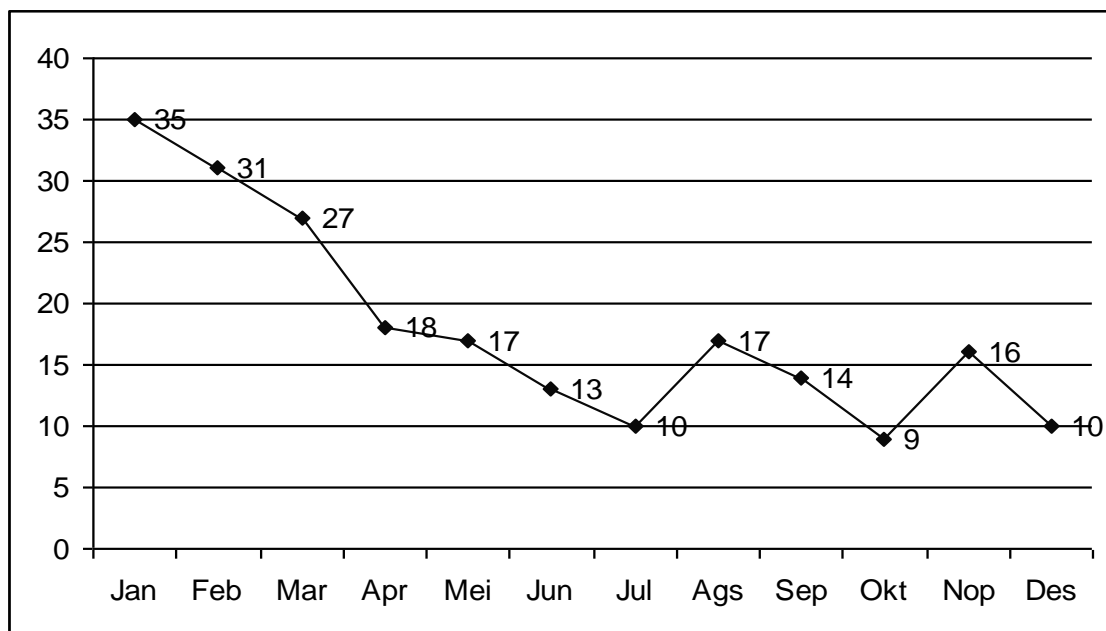
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Konflik Kekerasan

Berdasarkan data dokumentasi, hasil FGD, wawancara kepada para pelaku, observasi di lapangan, dan tentu melalui proses analisis kualitatif, yakni mendeskripsikan fenomena, mengategorikannya, dan menemukan konsep serta keterkaitan antar-kon-

sep tersebut, dapat ditemukan tujuh faktor yang dianggap menjadi penyebab terjadinya konflik kekerasan.

Kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang belum mapan (kesenjangan). Dalam politik, kegiatan dukung-mendukung adalah hal biasa. Tetapi hal tersebut akan lain, dalam arti membawa konsekuensi, apabila yang didukung memiliki dan/atau melibatkan massa dalam jumlah besar. Pada saat tertentu ketika dilakukan pemilihan kepemimpinan, misalnya Bupati/Walikota, dan DPRD, intensitas konflik kekerasan semakin meningkat. Dukungan yang diberikan kepada calon tertentu acapkali tidak bersifat rasional, melainkan emosional. Perbedaan pandangan dan visi tidak diselesaikan melalui dialog, tetapi pengerahan kekuatan massa.

Pengerahan massa akan mudah dilakukan apabila massa yang dimaksud mengalami deprivasi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran (Anwar, Bouvier, Smith, & Tol, 2005; Rozi, 2006). Berdasarkan data BPS 2007, angka kemiskinan Kabupaten Madiun sebesar 27%. Angka ini lebih besar dibanding rata-rata nasional, yakni 18%. Demikian juga jumlah pengangguran di Kabupaten Madiun tergolong tinggi, terutama untuk kelompok pengangguran terdidik. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan



Gambar 1. Trend terjadinya tindak kekerasan.

Transmigrasi pada 2006, dari 44.885 penduduk yang tercatat mencari pekerjaan, 20,77% berpendidikan SLTP ke bawah; 66,55 % berpendidikan SLTA dan hanya 12,68% berpendidikan Akademi/Perguruan Tinggi.

Kondisi tersebut ditunjang oleh banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Madiun. Berdasarkan data Kabupaten Madiun dalam angka, sebagian besar (51%) masyarakat bekerja di sektor pertanian. Dengan sebagian besar penduduknya bertani, maka dapat diduga bahwa banyak waktu luang yang dimiliki oleh masyarakat. Ketika orang banyak memiliki waktu luang, individu mudah digerakkan, termasuk dalam hal yang negatif (Cohen, 1998). Kekerasan akhirnya dianggap sebagai bentuk penyaluran energi.

Pemerintahan yang lemah, termasuk tidak adanya kepercayaan pada sistem keamanan dan sistem peradilan. Era reformasi yang cenderung mengalami *euphoria* tampaknya ikut memengaruhi intensitas kekerasan. Longgarnya sistem pemerintahan yang ditandai dengan lunturnya nilai-nilai kepatutan membuat sebagian orang seolah-olah boleh melakukan apa saja. Konflik kekerasan yang melibatkan anggota perguruan SHT dan SHW sebenarnya telah terjadi jauh sebelum reformasi, meskipun dalam skala yang mikro. Namun, seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, yang ditandai dengan runtuhnya Orde Baru, eskalasi konflik kekerasan semakin meningkat.

Fakta di lapangan yang didapat dari kepolisian Madiun menunjukkan bahwa sejak Maret 1998 hingga Februari 2007, telah terjadi 217 kasus kekerasan. Puncak peristiwa terjadi pada 2001 dengan 53 kasus, kemudian menurun hingga 9 kasus pada 2004 dan meningkat lagi pada 2005 dengan 30 kasus. Intensitas kekerasan juga semakin menguat seiring dengan semakin lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk di dalamnya petugas keamanan dan sistem peradilan.

Aparat sendiri seringkali tidak fair. “Kami tahu bahwa kendaraan bak terbuka tidak boleh digunakan untuk mengangkut penumpang. Tetapi mengapa yang dilarang hanya kami, sementara mereka tidak. Kami merasa diperlakukan tidak adil” (FGD III, 22 Juli 2007).

Mereka juga tahu bahwa hukuman yang diberikan oleh aparat keamanan atau melalui peradilan dapat “dibeli” dengan uang. Mereka yang telah nya-

ta-nyata melakukan pelanggaran, bahkan masuk kategori kriminal, dapat lepas begitu saja setelah membayar sejumlah uang (FGD III, 22 Juli 2007).

Pembelajaran kekerasan (Social learning). Madiun memiliki tradisi sejarah kekerasan yang cukup panjang. Tradisi kekerasan tersebut telah terjadi sejak lama, jauh sebelum era kemerdekaan. Dimulai dari zaman kerajaan Mataram yang melakukan penyerangan ke Purbaya (sekarang Madiun) pada 1586 dan 1587. Ketika itu, Mataram menderita kekalahan berat. Pada 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purbaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Djumilah dengan sejumlah kecil pengawalannya. Perang tanding terjadi antara Sutawidjaja dengan Raden Ayu Retno Djumilah, dilakukan di sekitar sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo – Madiun (Wikipedia, 2007).

Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, Madiun juga dipenuhi dengan konflik kekerasan. Peristiwa Madiun (*Madiun affairs*) yang terjadi sekitar September – Desember 1948, adalah sebuah konflik kekerasan horisontal yang tercatat dalam sejarah hitam negeri ini. Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik tokoh sipil maupun militer, di pemerintahan ataupun antara tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Berakhirnya peristiwa Madiun yang ditandai dengan ditangkap dan diadilinya Muso dkk, tidak berarti kekerasan di Madiun berhenti. Seiring meletusnya tragedi nasional PKI tahun 1965, Madiun kembali membara. Peristiwa itu didahului dengan konflik horisontal antara banyak kelompok yang bernaung di bawah payung partai politik ketika itu (Wikipedia, 2007).

Dari kilasan sejarah tersebut yang didukung oleh hasil interviu menunjukkan bahwa kekerasan bagi masyarakat Madiun adalah hal biasa, bahkan ada ungkapan yang provokatif: “Madiun geger iku wis biasa, gak Madiun lek gak geger” (Madiun rusuh itu sudah biasa, bukan Madiun kalau tidak rusuh (FGD II, 21 Juli 2007)). Keyakinan individu, termasuk di dalamnya sistem nilai (*values*) yang demikian memang menjadi potensi munculnya tindak kekerasan (Lopez & Emmer, 2002).

Prasangka kelompok. Ketika individu bergabung ke dalam suatu organisasi tertentu, biasanya ia akan memiliki kebanggaan atas kelompoknya. Hal ini juga terjadi pada mereka yang tergabung dalam

SHT dan SHW. SHT menganggap kelompoknyalah yang paling bagus dalam menerapkan ajaran SH. Begitu juga sebaliknya. Salah satu perbedaan yang menonjol di antara keduanya adalah dalam rekrutmen anggota. Dalam SHT, rekrutmen anggota dilakukan dengan cara dididik dulu, baru disahkan menjadi anggota. Sementara itu pada SHW, disahkan atau dilantik dulu menjadi anggota, baru kemudian dididik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap para pelaku ditunjukkan bahwa mereka memang tidak menyukai satu sama lain. Meskipun di antara mereka sebenarnya tidak ada masalah, termasuk secara pribadi, tetapi ketika di antara mereka bertemu, terlebih lagi apabila ada identitas tertentu yang bisa dikenali, maka niat bermusuhan seolah sulit dihindarkan.

Image orang SH pasti bermusuhan dengan orang winongo, walaupun dia tidak berbuat apa-apa. Mereka bertindak apapun ada keinginan untuk melakukan perlawanan karena nggak terima (P1). Pola pikir sebagaimana dikemukakan terdahulu, yakni menganggap bahwa anggota perguruan lain dipersangka sebagai *outsider* dan pelanggaran norma, diyakini sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya konflik kekerasan antara anggota SHT dan SHW. Temuan ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Tajfel (1982), yang telah lama dan secara serius melakukan penelitian tentang prasangka, diskriminasi, dan konflik antar-kelompok. Prasangka, terutama yang bersifat negatif, banyak menjadi sebab terjadinya konflik antar-kelompok. Prasangka merupakan evaluasi negatif seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain, semata-mata karena orang atau orang-orang tersebut merupakan anggota kelompok lain yang berbeda.

Solidaritas kelompok (Group Solidarity). Tidak kekerasan juga terjadi karena semangat membela anggota kelompok. Jika salah satu anggota kelompok mengalami masalah, misalnya perlakuan yang tidak mengenakkan dari anggota kelompok lain, maka besar kemungkinan sesama anggota kelompok akan melakukan pembelaan. Semangat membela teman begitu kuat. Pembelaan dilakukan tanpa melihat apakah teman yang dibelanya ada dalam posisi benar atau salah. "... saya tidak terima terus saya pulang dan melaporkan hal tersebut sama 'I'. Selanjutnya, saya dan 'I' langsung mendatangi 'B' dan akhirnya kami berkelahi"(P1). "... saya

langsung menghubungi teman-teman, kita langsung keliling pasar Caruban, berhubung nggak ketemu sama orang yang dicari akhirnya asal mukul orang" (P2).

Semangat membela kelompok tampaknya telah ditanamkan para senior melalui proses indoktrinasi dalam latihan.

Pernah ada kakak pelatih saya berkata: "Jangan merasa jantan satria, berani sendiri, orang bisa itu karena kita bersama kalau kamu sendiri sombong berarti. Kamu tidak boleh merasa ksatria sendiri. Kalau kamu sendiri, sementara musuhmu banyak, kamu pasti kalah, lebih baik kita bersama-sama pasti bisa menang (P1).

Lebih mendasar lagi, dalam konteks ajaran SH, semangat membela "Saudara" memang menjadi salah satu sumpah setia. Misalnya pada butir 8 Janji SHW dikatakan bahwa: "Saya harus tolong menolong, bantu-membantu, cinta kasih, kasih sayang, guyub rukun, serta samat sinamatan (menjalin persahabatan) dengan saudara-saudara seasuhan". Meskipun yang dimaksudkan pernyataan itu tentu tolong-menolong dalam hal kebaikan. Akan tetapi, makna yang terakhir tersebut seolah diabaikan. Yang mengemuka adalah spirit membantu teman, tidak peduli apakah teman yang bersangkutan memang layak dibela atau tidak. Dengan kata lain, spirit kelompok menjadi hal yang negatif ketika maknanya direduksi menjadi persoalan "dia kelompok saya, dia bukan kelompok saya".

Fenomena ini dapat dipahami. Dari pandangan teori identitas sosial, seseorang yang tergabung dalam kelompok akan melakukan komparasi, yakni membanding-bandingkan antara diri dan kelompoknya dengan orang atau kelompok lain. Dalam konteks perbandingan tersebut, anggota *ingroup* selalu akan memandang kelompoknya sendiri yang lebih baik, lebih kuat, lebih menyenangkan, dan lebih positif dibanding anggota kelompok *outgroup*, yang hampir selalu dipandang negatif (Baron & Byrne, 2000).

Sungguh pun ada hal-hal yang positif dari *outgroup*, biasanya justru dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi kelompok sendiri, sehingga perlu disaingi, diusahakan untuk dimiliki, atau bahkan harus dimusnahkan. Sebaliknya, ketika individu berada di *ingroup*-nya, ia mempersepsi anggota kelompoknya memiliki kelebihan, keunikan, dan berbeda dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Jenis olahraga. Dari perspektif kecabangan, jenis olahraga tampaknya juga ikut memengaruhi terjadinya konflik kekerasan (Kirker, Tenenbaum, & Mattson, 2000; Lemieux, McKelvie & Stout, 2007). Seperti termuat dalam ajaran ke-SH-an (Harsono, 2003; Soewarno, 1994), olah fisik berupa Pencak Silat merupakan media utama pembelajaran. Dalam Pencak Silat tersebut diajarkan berbagai macam jurus dan gerakan. Misalnya, untuk tingkat I diberikan 43 jurus, 13 tendangan *dubbel*, 13 pukulan *dubbel*, 19 pasangan lengkap, 11 gerakan *bungus*, dan 14 jenis senjata (Soewarno, 1994). Kesemua gerakan dan jurus tersebut pada intinya merupakan upaya pertahanan diri jika diserang lawan, upaya melakukan serangan kepada lawan, dan bahkan sampai pada titik-titik tertentu yang mematikan. Struktur materi yang kurang lebih sama, tentu dengan variasi dan intensitas yang berbeda, diberikan untuk tingkat II, dan tingkat III.

Dengan model aktivitas yang seperti itu, dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka individu yang tergabung dalam Pencak Silat akan mempersepsi dirinya memiliki kemampuan fisik yang lebih dibanding orang kebanyakan. Apalagi jika mereka sudah disahkan dan menyandang gelar “pendekar”, yakni sebutan bagi siswa perguruan yang telah menamatkan serangkaian program latihan jurus tertentu. Hal ini tentu berbeda apabila individu bergabung dalam jenis olahraga yang tidak memiliki karakteristik sebagaimana Pencak Silat. Misalnya cabang olahraga bola voli, senam, dan bulu tangkis. Kita tidak pernah mendengar, misalnya, konflik kekerasan antara perkumpulan senam yang satu dengan perkumpulan senam yang lain.

Faktor usia. Usia tampaknya ikut menjadi faktor yang memengaruhi frekuensi dan intensitas konflik. Dari kasus-kasus kekerasan yang terjadi sebagian besar melibatkan mereka yang berusia muda (remaja). Misalnya, ketika terjadi tindak kekerasan P1

berusia 20 tahun, P2 berusia 21 tahun, dan P3 berusia 16 tahun.

... ketika itu saya masih remaja dan bujang, jadi tawuran itu sering sekali. Tapi sekarang dah punya anak, saya mikir seribu kali. Sekarang saya jadi pelatih, saya menyarankan anak didik saya untuk lebih mengendalikan emosi (P3).

Ada semacam persepsi di kalangan mereka sendiri bahwa perkelahian fisik saat masih muda dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Pemahaman yang demikian pada dasarnya dapat dipahami. Menurut Erikson (sitat dalam Santrock, 1996) disebutkan bahwa remaja merupakan tahap ketika krisis identitas terjadi. Penyimpangan perilaku yang terjadi pada remaja, seperti perkelahian, minum-minuman keras, dan penggunaan obat terlarang, merupakan bentuk penegasan sebuah identitas, sungguhpun itu bersifat negatif.

Pola Terjadinya Tindak Kekerasan

Bagaimana pola terjadinya tindak kekerasan? Pola yang dimaksudkan di sini terkait dengan cara, prosedur, dan mekanisme terjadinya suatu peristiwa. Dari peristiwa satu ke peristiwa lain bisa jadi berbeda dalam karakteristiknya, baik dari sisi pelaku, korban, maupun tempat kejadian. Namun, terdapat pola yang relatif sama dari kasus-kasus yang terjadi. Analisis dilakukan terhadap lima kasus yang dipilih secara purposif (lihat Tabel 1).

Dari lima kasus yang dianalisis tersebut, pola terjadinya tindak kekerasan dapat digambarkan sebagai berikut.

Pertama. Kedua belah pihak menyeleksi simbol-simbol utama yang mewakili kelompok masing-masing. Kelompok SHT dan SHW sudah saling mengetahui ciri dan identitas masing-masing. Misalnya, baju kebesaran, tugu yang mencerminkan sim-

Tabel 1

Lima Kasus Kekerasan di Madiun Yang Menjadi Objek Analisis

Kasus	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Bentuk Kejadian
Kasus 1	19 Juli 1998	Geger	Pengroyokan
Kasus 2	15 Desember 1999	Dagangan	Pengrusakan
Kasus 3	30 Maret 1999	Jiwan	Pengrusakan
Kasus 4	16 Maret 2003	Pilangbango	Konvoi-Pengrusakan
Kasus 5	24 Maret 2004	Jl. Salak	Konvoi-Pengrusakan

Sumber: Data Polres Madiun

bol perguruan, basis pendukung perguruan, dan individu anggota perguruan sendiri.

Kedua. Menentukan cara yang paling tepat untuk dengan sengaja menodai simbol-simbol tersebut. Penodaan bisa dalam bentuk pelemparan, pengrusakan simbol—termasuk juga mengejek, mencederai, dan melakukan penghadangan—suatu tindakan yang akan memicu terjadinya tindak kekerasan.

Dari segi jumlah pelaku tindak kekerasan, selalu lebih dari satu orang, bisa kelompok kecil (kurang dari sepuluh orang) atau bisa juga dalam kelompok besar (ratusan orang). Sementara untuk korban, bisa saja hanya satu orang, misalnya dalam kasus 1, yakni penghadangan yang berujung pada pengroyokan. Korban dalam jumlah besar, termasuk masyarakat yang tidak berdosa, manakala terjadi kerusuhan massal seperti pada kasus 4 dan 5.

Pola kasus tersebut seolah menguatkan pendapat bahwa individu memiliki perilaku yang berbeda ketika dia ada dalam kelompok (Abidin, 2004; Baron & Byrne, 2000; Maksu, 2007), yang paling menonjol dalam kasus ini adalah deindividuasi dan dehumanisasi. Deindividuasi adalah sebuah kondisi ketika individu kehilangan identitasnya dan tampil bukan sebagai individunya, dan ini seringkali bersifat negatif. Dalam kelompok, seseorang menjadi lebih berani melakukan sesuatu, kendati itu menyimpang. Sementara itu, dehumanisasi berkaitan dengan kondisi ketika individu sudah tidak lagi mempertimbangkan nilai kemanusiaan dalam bertindak. Mereka memukul, membacok, bahkan membunuh dengan cara yang keji.

Dalam kasus yang sifatnya massal (kasus 4 dan 5), kerusuhan bisa berdimensi luas dan berakibat fatal. Kerusuhan akan dapat dicegah, setidaknya dikurangi, apabila orang yang ditokohkan oleh kelompok masing-masing, misalnya Mas Maji dari SHT dan Mbah Warno dari SHW, mengambil peran di lapangan. Misalnya dengan berpidato di depan massanya, tidak melanjutkan konvoi, atau melakukan perdamaian dengan cara-cara tertentu. Intinya, kepemimpinan menjadi faktor yang sangat penting ketika terjadi peristiwa konflik kekerasan.

Formula Teoretik Mengenai Kekerasan dalam Olahraga

Dari fakta empiris yang ditemukan jelas bahwa

munculnya konflik kekerasan tidak semata-mata karena faktor internal kedua kelompok perguruan, melainkan merupakan sesuatu yang kompleks. Dimulai dari faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang belum mapan, yang salah satu indikator utamanya adalah adanya kesenjangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran (lihat Gambar 2). Pemerintahan yang lemah dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan dan keadilan juga menjadi faktor dasar munculnya konflik kekerasan di antara anggota kelompok masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya dalam kasus konflik kekerasan yang melibatkan anggota perguruan SHT dan SHW, adalah peran faktor sejarah. Masyarakat mendapatkan pembelajaran kekerasan dari perjalanan sejarah Madiun sendiri, yang dari waktu ke waktu cenderung diwarnai oleh konflik horizontal. Mulai dari zaman Mataram, peristiwa 1948, sampai dengan tragedi nasional 1965. Dari sini seolah masyarakat mendapatkan pembenaran atas tindak kekerasan yang dilakukan. Menurut Bandura (sitat dalam Maksu, 2007), individu melakukan tindak kekerasan karena belajar—dalam arti mengamati dan mempelajari—dari peristiwa yang pernah dia saksikan dan dia rasakan. Peristiwa yang ia amati dan rasakan kemudian masuk ke dalam memori individu yang bersangkutan, yang sewaktu-waktu bisa dimunculkan apabila mendapatkan stimulus yang relatif sama dengan ketika peristiwa itu terjadi.

Kondisi dasar tersebut diperberat lagi dengan adanya variabel kelompok, yakni prasangka kelompok dan solidaritas kelompok di dalam masyarakat. Menganggap kelompoknyalah yang paling benar, dan kelompok lain dianggap salah. Demikian juga bila ada anggota kelompok yang berkonflik, anggota kelompok yang lain akan melakukan pembelaan, terlepas siapa yang salah dan siapa yang benar. Sikap dan keyakinan seperti itu akan mudah menimbulkan konflik yang bersifat massal.

Faktor pendukung yang juga ikut memengaruhi munculnya konflik adalah jenis olahraga dan faktor usia. Kedua faktor tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat Pencak Silat dan usia remaja sangat dekat dengan tindak kekerasan. Tentu akan berbeda andaikan itu klub bolavoli atau bulutangkis. Demikian juga akan berbeda apabila para anggotanya telah berusia dewasa, ketika stabilitas emosi telah mantap.

Keseluruhan faktor itu tidak akan terwujud da-

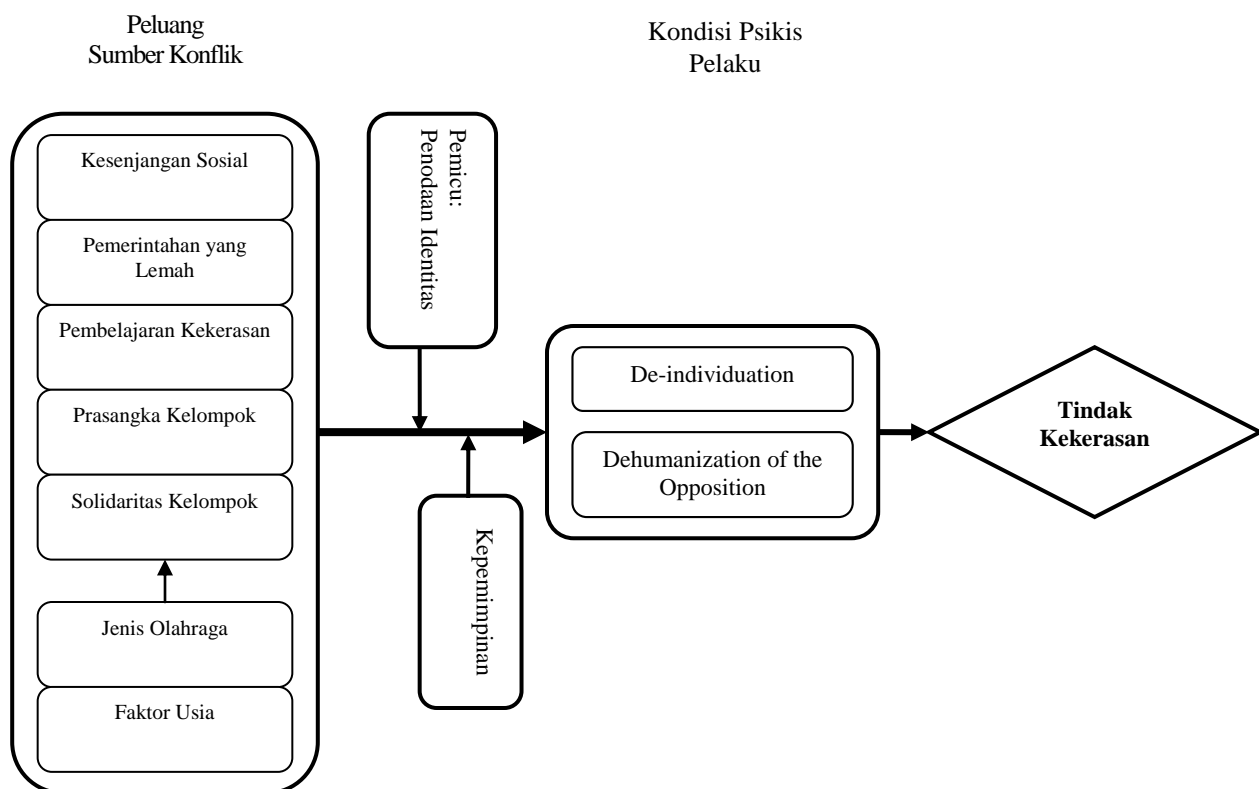
lam tindak kekerasan apabila tidak ada faktor pemicu, berupa penodaan terhadap simbol-simbol yang menjadi identitas masing-masing kelompok (misalnya memandang secara berlebihan sehingga dianggap menghina, dan anggota perguruan dianggap juga sebagai simbol/identitas). Tindak kekerasan masih ada kemungkinan dihambat manakala pemimpin yang ditokohkan oleh masing-masing kelompok mengambil peran, seperti menenangkan massa dan melakukan rekonsiliasi.

Simpulan dan Saran

Telah sebegitu jauh penelitian ini berusaha mengungkap ikhwal fenomena konflik kekerasan antara SHT dan SHW. Dari kajian empiris yang didasarkan pada fakta lapangan dengan didukung oleh analisis teoretik, peneliti sampai pada simpulan bahwa konflik kekerasan terjadi karena proses pembentukan identitas sosial yang terdistorsi. Bila kondisi dasar seperti kemiskinan dan pengangguran ti-

dak diperbaiki, demikian juga interaksi antar-kelompok perguruan, maka pecahnya konflik kekerasan kembali hanya soal waktu dan intensitas.

Ada beberapa hal yang disarankan, terutama terkait dengan upaya penyelesaian konflik kekerasan antara SHT dan SHW. a) Konflik kekerasan terjadi sebagai dampak dari krisis multidimensi, mencakup bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan interaksi antar-kelompok masyarakat. Karena itu, untuk mewujudkan transformasi damai dibutuhkan tindakan bagi semua hal yang terkait, bukan perhatian yang terpecah-pecah kepada satu atau dua hal saja, dan mengabaikan hal-hal lain. b) Elit perguruan tetap merupakan bagian dari masalah dan sekaligus bagian dari pemecahan. Adalah benar bahwa tidak terjadi konflik antara perguruan SHT dan SHW, tetapi tidak bisa dibantah juga bahwa mereka yang terlibat kekerasan merupakan anggota dari kedua perguruan tersebut. c) Perlu ada model *bottom-up* yang lebih inklusif dalam cara penyelesaian konflik. Ini untuk melengkapi model *top-down* seperti halnya “Kami adalah Satu” yang terkesan dipaksakan.



Gambar 2. Formulasi konseptual proses terjadinya konflik kekerasan.

Keterlibatan anggota perguruan di lapisan bawah dan kelompok-kelompok masyarakat berguna untuk mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan dan ikatan yang saling pengertian. d) Mengatasi konflik adalah suatu proses yang terkait dengan budaya tertentu, termasuk di dalamnya adanya faktor sejarah. Sungguh pun tidak bisa dalam waktu cepat dalam mengubah budaya, pendidikan—apakah dalam bentuk informal, formal, dan nonformal—merupakan wahana yang efektif untuk menanamkan sikap toleransi dalam keberagaman dan perdamaian. e) Dalam rekrutmen anggota perguruan perlu lebih selektif, terutama terkait dengan usia calon. Sebagian besar pelaku kekerasan adalah mereka yang berusia remaja, bagi mereka kekerasan itu “indah” dan melanggar aturan merupakan sesuatu yang menyenangkan, sebagai salah satu bentuk penegasan identitas.

Pustaka Acuan

- Abidin, Z. (2004). *Penghakiman massa: Studi psikologi sosial tentang kekerasan kolektif terhadap orang-orang yang dipersepsi sebagai pelaku kejahatan*. Disertasi, tidak dipublikasikan. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Anwar, D.F., Bouvier, H., Smith, G., & Tol, R. (Eds.). (2005). *Konflik kekerasan internal: Tinjauan sejarah, ekonomi-politik, dan kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Baron, R.A., & Byrne, D. (2000). *Social psychology* (9th edition). Boston: Allyn & Bacon.
- Bentrok merajalela, Madiun mencekam (2003, 17 Maret). Jawa Pos, hlm. 11.
- BPS – Madiun (2006). *Kota Madiun dalam angka*. Madiun: Biro Pusat Statistik.
- Bushman, B.J., & Anderson, C.A. (2001). Is it time to pull the plug on the hostile versus instrumental aggression dichotomy? *Psychological Review*, 108(1), 273-279.
- Cohen, D. (1998). Culture, social organization, and patterns of violence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75(2), 408-419.
- Cresswell, J. (1994). *Research design: Qualitative and quantitative approaches*. London: Sage.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2000). *Handbook of qualitative research* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Gerung, R. (2007, 12 Juni). Nilai lokal bisa jadi jelek. Kompas, hlm. 12
- Giulianotti, R., Bonney, N., & Hepworth, M. (1994). *Football, violence and social identity*. Routledge: London.
- Gong (2007, edisi 77). *Silat: Dunia abu-abu gerak*. Yogyakarta: Yayasan Media dan Seni Tradisi.
- Harrison, L.E., & Huntington, S.P. (Ed). (2006). *Kebangkitan peran budaya* (terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Harsono, T. B. H. (2003). *Menggapai jiwa terate*. Madiun: Lawu Pos
- Hewstone, M., & Cairns, E., (2006). Social psychology and intergroup conflict. Available at <http://www.ripon.edu/academics/psychology.hewstone.htm>
- Kerusuhan Plaosan rugi Rp. 1 M. (2002, 7 November). Jawa Pos, hlm. 9.
- Kirker, B., Tenenbaum, G., & Mattson, J. (2000). An investigation of the dynamics of aggression: Direct observations in ice hockey and basketball. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 71, 373-243.
- Lemieux, P., McKelvie, S., & Stout, D. (2007). *Self-reported hostile aggression in contact athletes, no contact athletes, and non-athletes*. Journal on-line in Sport Psychology, available at <http://www.athleticsinsight.com>
- Lopez, V.A., & Emmer, E.T. (2002). Influences of beliefs and values on male adolescent's decision to commit violence offenses. *Psychology of Men & Masculinity*, 3(1), 28-40.
- Maksum, A. (2007). *Psikologi olahraga: Teori dan aplikasi*. Surabaya: Fakultas Ilmu Keolahragaan Unesa.
- Maksum, A. (2005). Olahraga membentuk karakter: Fakta atau mitos. *Jurnal Ordik*, 3(1), 15-22.
- Nelson, T. (2002). *The psychology of prejudice*. Boston: Allyn & Bacon.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods* (2nd ed.) Newbury Park, C.A.: Sage
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. London: Sage.
- Rozi, S. (2006). *Kekerasan komunal: Anatomi dan resolusi konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santrock, J. W., (1996). *Adolescence* (6th ed.).

- Dubuque, IA: Brown & Benchmark Publishers.
- Sarwono, S. W. (2006). *Psikologi prasangka orang Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Shields, D. L., & Bredemeier, B. J. (1994). *Character development and physical activity*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Soewarno, R. D. J. (1994). *Pusaka pencak silat dalam tiga zaman: Persaudaraan Setia Hati Wino-ngo Tunas Muda*. Buku khusus untuk putra asuh. Madiun: Penulis.
- Syahril, S. (2007). Konflik SHT dan SHW. Diunduh 26 April 2007, dari www.mail-archive.com/silatindonesia@yahoogroups.com
- Tajfel, H. (1982). Social psychology of intergroup relations. *Annual Review of Psychology*, 33, 1-39
- Tenenbaum, G., Steward, E., Singer, R.N., & Duda, J. (1997). *Position statement on aggression and violence in sport: An ISSP position stand*. Available at <http://www.issponline.org/>
- Umam, N. (2007). Melacak akar konflik antar-perguruan silat di Karesidenan Madiun. Diunduh 23 Juni 2007, dari <http://setiahati.blogspot.com>
- Wann, D. L., Shelton, S., Smith, T., & Walker, R. (2002). Relationship between team identification and trait aggression: A replication. *Perceptual and Motor Skill*, 94, 595-598.
- Wikipedia, (2007). Peristiwa Madiun. Diunduh 14 Juli 2007 dari <http://id.wikipedia.org/wiki>